



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN PENGAWASAN NOTARIS  
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

**TESIS**

**DANIEL, S.H.**

**0806426566**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN PENGAWASAN NOTARIS  
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan**

**DANIEL, S.H.**

**0806426566**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Daniel, S.H.

N.P.M. : 0806426566

Tanda Tangan :

Tanggal : 23 Juni 2010


## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Daniel, S.H.  
N.P.M. : 0806426566  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : PERBANDINGAN PENGAWASAN NOTARIS  
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

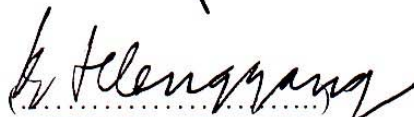
Pembimbing : Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum.

  
(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Chairunnisa S. Selenggang S.H., M.Kn.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pembuatan tesis ini tidak dapat dibuat tanpa adanya petunjuk serta adanya bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini ingin disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga selaku Dewan Penguji, beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan tesis ini.
4. Ibu Chairunissa S. Selenggang, S.H., M.Kn.selaku Dewan Penguji.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
6. Segenap staf perpustakaan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala pelayanannya.
7. Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris Yanti Budiharsono, S.H., dan Bapak Silvester Djuma, S.H. yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
8. Rudyanto, Like, Dewi Anggereni, dan Devyana Fitri C, ayah, ibu, dan adik-adik yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil selama studi.
9. Sahabat-sahabat penulis, Purnama, Ferengki, Vinny Halim, Basilia Monali, Hendra, Viona Theliana, Alicia, Andy Wiryanto, Santo Putra, Agus Triono, rekan-rekan Dhammasena terima kasih untuk doa dan dukungannya.

10. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan sahabat penulis, Fellisia, Darianne Vertical Aliwarga, Dini Dwiyana, Dyah, Irwan, Ronald, Melly, Adilya, dan lain-lain
11. Seluruh teman-teman angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
12. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya tesis ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk ini dimohon maaf dan diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, tesis ini diharapkan dapat diterima dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel, S.H.  
N.P.M. : 0806426566  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERBANDINGAN PENGAWASAN NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**,

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 23 Juni 2010

Yang menyatakan

(Daniel, S.H.)

## ABSTRAK

Nama : Daniel, S.H.  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : PERBANDINGAN PENGAWASAN NOTARIS SEBELUM  
DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam *Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3*). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

Kata Kunci: *Perbandingan Fungsi Pengawasan Notaris;  
Sebelum dan Sesudah Berlakunya undang-undang Nomor 30 Tahun  
2004;  
Majelis Pengawas.*



## ABSTRACT

Name : Daniel, S.H.  
Study Program : Magister of Notary  
Title : THE COMPARISON OF NOTARY OVERSEEING  
FUNCTION BEFORE AND AFTER ADOPTING THE  
ACTS NUMBER 30 OF 2004

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable released from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3). As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly. In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those.

Key words: *The comparison of Notary overseeing function  
Before and after adopting the Acts Number 30 of 2004  
Supervision-assembly*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Permasalahan .....	9
1.3 Metode Penelitian .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>2. PERBANDINGAN PENGAWASAN NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris	
2.1.1 Pengertian Notaris .....	13
2.1.2 Tugas dan Wewenang Notaris .....	18
2.1.3 Daerah Jabatan Notaris .....	22
2.1.4 Akta Notaris .....	24
2.1.5 Sumpah Jabatan Notaris .....	37
2.1.6 Notaris Sebagai Profesi .....	38
2.1.7 Kode Etik Notaris .....	42
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	
2.2.1 Pengertian Pengawasan .....	49
2.2.2 Manfaat Pengawasan .....	51
2.2.3 Norma dan Etika Pengawasan .....	52
2.2.4 Pengawasan Terhadap Notaris .....	53
2.3 Praktek Pengawasan Notaris	
2.3.1 Pengawasan Terhadap Notaris Sebelum Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris .....	74
2.3.2 Pengawasan Terhadap Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris .....	79
2.3.3 Manfaat Pengawasan Bagi Notaris .....	89
<b>3. PENUTUP</b>	
3.1 Simpulan .....	91
3.2 Saran .....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.
4. Berita Acara Pemeriksaan Notaris Nomor : 09.I/MPD.JKT.PST/BAP/IV/2010.

